

**ANALISIS KEMITRAAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH  
DENGAN PT ASTRA DIGITAL ARTA (ASTRAPAY) DALAM PEMBAYARAN BRT  
TRANS JATENG**

Nikmatul Hikmah., Neny Marlina

**Departemen Politik dan Pemerintahan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro**

Jln. Dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang. Kode Pos 50275

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7460033

Laman: <https://fisip.undip.ac.id/> email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas kemitraan antara Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dan PT Astra Digital Arta (AstraPay) dalam penerapan sistem pembayaran digital pada BRT Trans Jateng. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menyoroti efektivitas kerja sama dalam meningkatkan efisiensi transaksi, kenyamanan pengguna, dan transparansi pembayaran, sejalan dengan konsep smart city. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi AstraPay berdampak positif dengan mempercepat proses pembayaran, mengurangi penggunaan uang tunai, serta meningkatkan transparansi transaksi. Namun, masih terdapat kendala seperti minimnya sosialisasi, rendahnya literasi digital di kalangan pengguna tertentu, serta keterbatasan infrastruktur digital di daerah pinggiran. Tingkat adopsi AstraPay masih rendah, sehingga manfaat kerja sama ini belum maksimal. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi sistem pembayaran digital ini memerlukan penguatan regulasi, peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta optimalisasi integrasi pembayaran non-tunai dengan berbagai platform guna mewujudkan ekosistem transportasi publik yang lebih inklusif, modern, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci** : Kerjasama Pemerintah dan Swasta dan Pembayaran Digital

**ABSTRACT**

*This study examines the partnership between the Central Java Provincial Transportation Agency and PT Astra Digital Arta (AstraPay) in implementing a digital payment system for BRT Trans Jateng. Using a qualitative descriptive method, the research highlights the effectiveness of this collaboration in enhancing transaction efficiency, user convenience, and payment transparency, in line with the smart city concept. The findings indicate that AstraPay's implementation has had a positive impact by accelerating payment processes, reducing cash usage, and improving transaction transparency. However, challenges remain, including limited socialization, low digital literacy among certain user groups, and inadequate digital infrastructure in suburban areas. The adoption rate of AstraPay remains low, preventing the partnership from achieving its full potential. Therefore, the success of digital payment system implementation requires strengthened regulations, increased public education and outreach, and optimized integration of cashless payment systems across various platforms to create a more inclusive, modern, and sustainable public transportation ecosystem.*

**Keywords:** *Public-Private Partnership, Digital Payment*

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik, yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Dalam sistem desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur pelayanan publik, termasuk transportasi umum. Transportasi yang efektif, nyaman, dan terjangkau menjadi kebutuhan dasar masyarakat dan harus dikelola secara efisien.

Di era digital, inovasi dalam pelayanan publik menjadi keharusan, termasuk dalam sistem pembayaran transportasi. Kemitraan antara pemerintah dan swasta (*Public-Private Partnership*) menjadi strategi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. AstraPay, sebagai sistem pembayaran digital dari PT Astra Digital Arta, telah diintegrasikan dalam BRT Trans Jateng sejak 2021 untuk meningkatkan efisiensi transaksi, transparansi, dan kenyamanan pengguna.

Meskipun kerja sama ini membawa manfaat dalam mempercepat pembayaran dan mengurangi penggunaan uang tunai, terdapat tantangan seperti kurangnya sosialisasi, rendahnya literasi digital, serta keterbatasan infrastruktur di daerah

tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kerja sama ini, dampaknya bagi masyarakat, serta efektivitasnya dalam menciptakan ekosistem transportasi publik yang lebih modern dan inklusif.

Penelitian mengenai kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sistem transportasi publik serta implementasi pembayaran digital telah dikaji dari berbagai perspektif. Beberapa penelitian sebelumnya telah memberikan gambaran tentang tantangan, peluang, dan dampak dari skema kerja sama ini dalam meningkatkan layanan publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Desi Yuli Aryani dan Mardwi Rahdriawan (2016) membahas peluang penerapan skema *Public-Private Partnership* (PPP) dalam pembangunan infrastruktur Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun skema PPP belum diterapkan, terdapat kemungkinan untuk menggunakannya selama kepemilikan aset tetap berada di bawah pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini lebih berfokus pada kerja sama di sektor transportasi publik, khususnya dalam implementasi sistem pembayaran digital pada layanan BRT Trans Jateng.

Dalam konteks analisis pelayanan dan efektivitas sistem transportasi publik, penelitian Weldy Anugra Riawan (2018) mengenai kinerja BRT di Kota Batam menunjukkan bahwa fasilitas transportasi masih kurang memadai dalam aspek kenyamanan, keselamatan, dan keamanan pengguna. Temuan ini memperkuat urgensi peningkatan layanan transportasi melalui inovasi, salah satunya dengan penerapan sistem pembayaran digital. Penelitian ini melanjutkan kajian tersebut dengan menyoroti bagaimana sistem pembayaran digital AstraPay berkontribusi terhadap efisiensi dan transparansi layanan BRT Trans Jateng.

Implementasi pembayaran digital dalam layanan publik juga telah dikaji oleh Rora Arina Mubasari dan Rina Martini (2021), yang meneliti kerja sama antara Pemkot Semarang dan PT GoJek Indonesia dalam penyediaan Go-Pay sebagai metode pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan pendapatan daerah serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital. Meskipun sama-sama membahas digitalisasi pembayaran dalam layanan publik, penelitian ini berbeda dalam objek kajian, yang berfokus pada sektor

pajak daerah, sementara penelitian ini menyoroti sektor transportasi publik.

Dari sisi integrasi sistem transportasi publik, penelitian Imas Ulin Nikmah menyoroti dampak persaingan antara BRT Trans Semarang Koridor 2 dan BRT Trans Jateng Koridor 1, yang menyebabkan penurunan pendapatan akibat rute yang berhimpitan. Kajian ini menegaskan perlunya kebijakan transportasi yang lebih terintegrasi, termasuk dalam sistem pembayaran digital, guna meningkatkan efisiensi dan daya saing layanan transportasi publik.

Dalam aspek regulasi dan kelembagaan, penelitian Alfini Nurmayasari, Dewi Erowati, dan Nunik Retno Herawati menyoroti permasalahan hukum dan kelembagaan dalam kerja sama antara Pemkot Semarang dan PT Dompot Anak Bangsa dalam penerapan Go-Pay pada BRT Trans Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya pembaruan MoU serta lemahnya peran kelembagaan menjadi kendala utama dalam implementasi sistem pembayaran digital. Kajian ini relevan dengan penelitian ini, yang juga mengkaji tantangan dalam kerja sama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dengan PT Astra Digital Arta (AstraPay), terutama terkait efektivitas,

transparansi, dan penerimaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan urgensi inovasi pelayanan publik, pemerintah perlu beradaptasi dalam mengelola layanan transportasi agar lebih modern dan efisien. Penerapan sistem pembayaran digital, seperti AstraPay di BRT Trans Jateng, merupakan langkah strategis dalam mendukung konsep *smartcity* serta meningkatkan transparansi dan kenyamanan pengguna. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada sosialisasi yang menyeluruh, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penguatan regulasi dan infrastruktur yang mendukung.

Penelitian ini berkontribusi dalam mengisi celah yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya, yakni menganalisis efektivitas kerja sama pemerintah dan swasta dalam konteks digitalisasi pembayaran transportasi publik, serta bagaimana tantangan yang ada dapat diatasi untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih inklusif, modern, dan berkelanjutan.

Berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan dengan menganalisis kemitraan antara Dinas

Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dan PT Astra Digital Arta (AstraPay) dalam sistem pembayaran digital BRT Trans Jateng. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas kerja sama dalam meningkatkan efisiensi transaksi, kenyamanan pengguna, serta transparansi pembayaran.

Penelitian ini mengkaji tantangan yang masih dihadapi, seperti kurangnya sosialisasi sistem pembayaran digital, rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat tertentu, serta keterbatasan infrastruktur di daerah pinggiran. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan dari studi-studi sebelumnya, tetapi juga menawarkan wawasan baru mengenai bagaimana digitalisasi pembayaran dapat dioptimalkan dalam sistem transportasi publik yang lebih modern dan inklusif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis proses kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan PT Astra Digital Arta (AstraPay) dalam implementasi sistem pembayaran digital pada layanan BRT Trans Jateng. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami mekanisme kemitraan yang diterapkan, mengevaluasi efektivitas kerja sama dalam meningkatkan efisiensi transaksi dan transparansi

pembayaran, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan sistem pembayaran digital di transportasi publik.

Penelitian ini didasarkan pada beberapa konsep utama yang relevan dengan analisis kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan PT Astra Digital Arta (AstraPay) dalam penerapan sistem pembayaran digital pada layanan BRT Trans Jateng. Konsep-konsep tersebut meliputi *Public-Private Partnership (PPP)*, *Good Governance*, dan Sistem Pelayanan Publik. Ketiga kerangka teori ini digunakan untuk memahami bagaimana kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam digitalisasi pembayaran dapat meningkatkan efisiensi transaksi, transparansi keuangan, serta kualitas layanan transportasi publik.

Salah satu teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Public-Private Partnership (PPP)* atau Kerja Sama Pemerintah-Swasta (KPS). Model ini menjelaskan bagaimana sektor publik dan swasta dapat bekerja sama untuk menyediakan layanan atau infrastruktur dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Menurut William J. (2009), *PPP* merupakan bentuk perjanjian di mana sektor privat

diberikan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi pemerintah dalam waktu tertentu, menerima kompensasi atas penyelenggaraan layanan, serta menanggung risiko yang muncul selama pelaksanaan kerja sama. Dalam konteks penelitian ini, *PPP* digunakan untuk memahami bagaimana kerja sama antara Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dan PT Astra Digital Arta dalam implementasi AstraPay disusun, termasuk mekanisme bisnis yang diterapkan, pembagian tanggung jawab, serta manfaat yang diperoleh kedua belah pihak.

Selain konsep *PPP*, penelitian ini juga berlandaskan pada prinsip *Good Governance*, yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan layanan publik. Menurut *United Nations Development Programme (UNDP)*, *Good Governance* mencakup transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta partisipasi publik dalam penyelenggaraan kebijakan. Dalam penerapan sistem pembayaran digital AstraPay di BRT Trans Jateng, prinsip *Good Governance* menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga meningkatkan transparansi keuangan, meminimalkan potensi penyalahgunaan dana, serta

memperkuat akuntabilitas pengelolaan sistem transportasi publik. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana kerja sama ini telah memenuhi prinsip *Good Governance*, terutama dalam aspek transparansi sistem pembayaran, kemudahan akses bagi masyarakat, serta efektivitas dalam meningkatkan efisiensi transportasi publik.

Dalam analisis sistem pembayaran digital pada transportasi publik, penelitian ini juga menggunakan konsep Sistem Pelayanan Publik untuk memahami bagaimana digitalisasi pembayaran dapat meningkatkan kualitas layanan transportasi bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara layanan publik harus memenuhi standar tertentu, termasuk keterjangkauan, inovasi layanan, serta efektivitas dalam pelaksanaannya. Penerapan AstraPay dalam sistem pembayaran BRT Trans Jateng bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas pengguna terhadap layanan transportasi, mengurangi ketergantungan pada pembayaran tunai, serta mempercepat proses transaksi. Namun, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada

kesiapan infrastruktur, tingkat literasi digital masyarakat, serta strategi sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan pihak swasta. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana digitalisasi pembayaran dapat diintegrasikan dengan sistem pelayanan publik yang lebih luas, serta tantangan yang masih dihadapi dalam implementasi kebijakan ini.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam proses kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan PT Astra Digital Arta dalam penerapan sistem pembayaran digital AstraPay pada layanan BRT Trans Jateng. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara komprehensif berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, termasuk perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, manajemen PT Astra Digital Arta, serta pengguna layanan BRT Trans Jateng. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen kebijakan, laporan transaksi, serta

kajian akademik mengenai digitalisasi sistem pembayaran transportasi.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan dari wawancara dan dokumen yang dikumpulkan. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi untuk memahami pola kerja sama, efektivitas implementasi sistem pembayaran digital, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan temuan penelitian dengan teori *Public-Private Partnership (PPP)*, *Good Governance*, dan Sistem Pelayanan Publik, guna mengevaluasi sejauh mana kerja sama ini mendukung peningkatan layanan transportasi publik yang lebih efisien, transparan, dan inklusif.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Bentuk Kemitraan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dengan PT Astra Digital Arta**

BRT Trans Jateng dikembangkan sebagai solusi atas permasalahan transportasi di Jawa Tengah, seperti kemacetan, tingginya emisi kendaraan

bermotor, serta rendahnya minat masyarakat terhadap angkutan umum. Sejak dirancang pada 2014 dan resmi beroperasi pada 2017 dengan sistem *Buy The Service (BTS)*, program ini bertujuan menyediakan transportasi publik yang lebih efisien, terjangkau, dan ramah lingkungan. Pemerintah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencakup aspek keterjangkauan tarif, keselamatan, kenyamanan, serta kepastian jadwal keberangkatan dan kedatangan. Hingga 2023, BRT Trans Jateng telah memiliki tujuh koridor layanan di berbagai wilayah, dengan tarif subsidi yang mendukung aksesibilitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pelajar, dan pekerja sektor informal. Ke depan, pemerintah berupaya memperluas jaringan layanan, meningkatkan kualitas armada, serta mengintegrasikan transportasi publik dengan moda lain seperti kereta api dan angkutan pengumpan guna menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien dan berkelanjutan.

PT Astra Digital Arta, anak perusahaan PT Astra International Tbk, berfokus pada layanan keuangan digital melalui AstraPay, dompet digital yang diluncurkan pada Juni 2020 dan telah mendapat izin dari Bank Indonesia. AstraPay menawarkan berbagai layanan

pembayaran, termasuk tagihan listrik, pajak kendaraan, BPJS, serta pembelian pulsa dan paket data. Dengan integrasi ke FIFGROUP, ACC, dan TAF, AstraPay juga memfasilitasi pembayaran angsuran kendaraan serta layanan paylater melalui Maucash. AstraPay mendukung transaksi QRIS di lebih dari 14 juta merchant di Indonesia, termasuk sektor transportasi, ritel, serta makanan dan minuman. Keunggulannya terletak pada sinergi dengan ekosistem Astra yang luas, termasuk kerja sama dengan Jaklingko Jakarta untuk mendukung sistem pembayaran transportasi terintegrasi. AstraPay terus berkembang dengan strategi kemitraan internal dan eksternal, serta berkomitmen pada inklusi keuangan dengan mengadopsi teknologi terkini guna meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna dalam ekosistem digital di Indonesia.

Kerja sama antara Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dan PT Astra Digital Arta (AstraPay) bertujuan untuk mengimplementasikan sistem pembayaran non-tunai pada layanan Trans Jateng. Integrasi AstraPay dengan aplikasi SI ANTENG dan mesin e-ticketing memungkinkan pengguna melakukan pembayaran tiket secara cepat dan praktis menggunakan teknologi *QR Code*. Langkah ini

diharapkan meningkatkan efisiensi layanan transportasi, mengurangi ketergantungan pada uang tunai, serta menciptakan sistem pembayaran yang lebih transparan dan akuntabel.

Perjanjian ini berlandaskan beberapa regulasi utama, termasuk UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur tata kelola transportasi umum, serta UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menekankan transparansi dan kemudahan akses layanan masyarakat. Selain itu, peraturan Bank Indonesia terkait sistem pembayaran elektronik menjadi landasan hukum dalam penggunaan uang elektronik sebagai metode transaksi utama.

Dinas Perhubungan bertanggung jawab menyediakan infrastruktur dan fasilitas e-ticketing yang mendukung implementasi sistem pembayaran digital. Mereka juga memiliki hak untuk mengakses laporan transaksi guna memantau dan mengelola pendapatan dari layanan Trans Jateng. Sementara itu, AstraPay bertanggung jawab atas penyediaan sistem pembayaran yang aman, pemeliharaan berkala, serta transparansi dalam pengelolaan transaksi, dengan dukungan infrastruktur dari Dinas Perhubungan.



Secara teknis, pengguna dapat membayar tiket melalui aplikasi mobile atau dengan memindai *QR Code* pada mesin tiket di halte dan armada Trans Jateng. Semua transaksi diproses oleh AstraPay dan dana disalurkan ke rekening Dinas Perhubungan sesuai prosedur yang telah disepakati. Untuk menjaga akurasi pencatatan, dilakukan mekanisme rekonsiliasi berkala dan sistem monitoring guna mencegah kesalahan transaksi.

Perjanjian ini berlaku selama tiga tahun sejak 15 November 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Jika terjadi sengketa, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah, atau jika tidak mencapai mufakat, dapat dibawa ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Selain itu, perjanjian ini mencakup ketentuan perlindungan data pengguna dan kerahasiaan informasi yang hanya boleh digunakan untuk kepentingan operasional sesuai regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia.

Dalam situasi *force majeure* seperti bencana alam atau kebijakan pemerintah yang berdampak pada layanan, kedua pihak wajib berkoordinasi untuk mengurangi dampaknya. Jika terjadi pelanggaran serius terhadap ketentuan perjanjian,

kerja sama dapat diakhiri lebih awal dengan pemberitahuan tertulis dan penyelesaian kewajiban yang masih tertunda sebelum penghentian resmi.

## **2. Perbandingan Metode Pembayaran**

Kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dalam layanan transportasi publik, seperti BRT Trans Jateng, mencerminkan implementasi *public-private partnership (PPP)*. Pemerintah, dalam hal ini Dinas Perhubungan Jawa Tengah, bertindak sebagai regulator dan penyedia layanan utama, sementara PT Astra Digital Arta menghadirkan inovasi teknologi melalui sistem pembayaran digital AstraPay. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat transaksi, serta mengurangi antrean di halte, sehingga meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi pengguna transportasi umum. Selain itu, kerja sama ini juga mendukung upaya modernisasi sistem transportasi publik melalui digitalisasi.

Perbandingan antara metode pembayaran tunai dan cashless menunjukkan bahwa *cashless* lebih cepat, aman, dan praktis, tetapi masih menghadapi tantangan dalam

aksesibilitas dan biaya transaksi. Pembayaran tunai memiliki risiko kehilangan atau pemalsuan uang, sementara metode cashless lebih aman karena menggunakan sistem enkripsi dan autentikasi. Namun, transaksi tunai masih mendominasi di tahun 2024 dengan 93,6% dari total transaksi, atau sekitar 6.481.660 transaksi, dibandingkan transaksi cashless yang hanya mencapai 406.887 transaksi. Meski demikian, ada peningkatan signifikan dalam penggunaan metode cashless pada bulan-bulan tertentu, seperti Mei (+36,95%) dan Juli (+34,30%), yang kemungkinan dipengaruhi oleh momen khusus seperti liburan atau perayaan. Sebaliknya, terjadi penurunan pada bulan April (-22,45%) dan Juni (-14,58%), menunjukkan bahwa adopsi pembayaran digital belum sepenuhnya stabil dan masih bergantung pada kebijakan promosi, infrastruktur, serta preferensi pengguna.

QRIS menjadi metode cashless paling banyak digunakan dengan 233.131 transaksi (3,4%), diikuti oleh tapping dengan 145.680 transaksi (2,1%), sementara Si Anteng hanya menyumbang 28.076 transaksi (0,4%). Data ini menunjukkan bahwa QRIS dan tapping lebih diminati karena kemudahan penggunaannya dan

aksesibilitasnya yang lebih luas. Namun, penggunaan AstraPay dalam layanan Si Anteng masih terbatas, karena hanya berlaku untuk tarif umum, sehingga tidak menarik bagi pengguna yang mendapat tarif khusus seperti pelajar dan buruh. Selain itu, peningkatan penggunaan AstraPay lebih banyak terjadi saat ada promo khusus, sebagaimana terlihat dalam lonjakan jumlah transaksi pada bulan-bulan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa insentif promosi lebih berperan dalam peningkatan penggunaan AstraPay dibandingkan dengan adopsi yang stabil dan berkelanjutan.

### **3. Analisis Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan PT. Astra Digital Arta**

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya meningkatkan kualitas layanan transportasi publik dengan mendigitalisasi sistem pembayaran pada BRT Trans Jateng. Salah satu langkah strategisnya adalah bekerja sama dengan PT Astra Digital Arta untuk mengadopsi AstraPay sebagai metode pembayaran *non-tunai*. Kerja sama ini diwujudkan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) tanpa skema bagi hasil bagi pemerintah, bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi keuangan dalam transportasi publik.

Saat ini, BRT Trans Jateng menyediakan metode pembayaran tunai dan non-tunai, termasuk AstraPay, QRIS, kartu multitrip PT KCI, serta *e-money* dari berbagai bank. Namun, adopsi pembayaran *non-tunai* masih rendah, hanya 5,92% dari total transaksi, karena kebiasaan masyarakat yang masih bergantung pada uang tunai. Untuk mendorong penggunaan AstraPay, pemerintah dan Astra Digital Arta memberikan promo *cashback* 70% melalui aplikasi SiAnteng selama empat bulan.

Implementasi sistem ini memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi transaksi dan akuntabilitas keuangan, serta mempermudah pengguna dalam bertransaksi. Selain itu, petugas di dalam bus kini diwajibkan menawarkan metode pembayaran digital terlebih dahulu sebelum menerima uang tunai. Respons masyarakat terhadap kebijakan ini beragam; sebagian menyambut baik karena lebih praktis dan aman, tetapi sebagian lainnya masih lebih nyaman dengan pembayaran tunai, terutama mereka yang kurang familiar dengan transaksi digital.

Dari perspektif *Good Governance*, digitalisasi ini mencerminkan prinsip transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam layanan

publik. Meskipun demikian, tantangan utama tetap ada, seperti literasi digital yang belum merata dan keterbatasan infrastruktur internet di beberapa wilayah. Untuk mengatasinya, diperlukan sosialisasi, edukasi, dan peningkatan infrastruktur digital.

Secara ekonomi, kerja sama ini tidak memberikan keuntungan finansial langsung bagi pemerintah, karena pendapatan tarif tetap masuk sepenuhnya ke pemerintah tanpa potongan. PT Astra Digital Arta memperoleh manfaat dari peningkatan jumlah pengguna AstraPay, sementara pemerintah mendapatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan layanan transportasi. Ke depan, pemerintah diharapkan terus mengembangkan strategi promosi, edukasi, dan infrastruktur agar sistem pembayaran digital lebih inklusif dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. Kesimpulan

Kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan PT Astra Digital Arta dalam penyediaan AstraPay sebagai metode pembayaran BRT Trans Jateng mencerminkan konsep *Public Private Partnership (PPP)* yang bertujuan meningkatkan efisiensi transaksi, kenyamanan pengguna, dan transparansi

pembayaran. Implementasi sistem ini membawa manfaat seperti percepatan pembayaran, pengurangan penggunaan uang tunai, dan peningkatan transaksi digital, sesuai dengan teori *PPP* yang menekankan peran swasta dalam meningkatkan layanan publik. Namun, tantangan seperti kurangnya sosialisasi, rendahnya literasi digital, dan keterbatasan infrastruktur masih perlu diatasi. Dalam teori *Good Governance*, transparansi, efektivitas, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini, sehingga diperlukan strategi sosialisasi, penguatan regulasi, dan pengembangan infrastruktur digital. Ke depan, kolaborasi ini dapat dioptimalkan dengan memastikan keberlanjutan, inklusivitas, dan kesiapan masyarakat dalam mengadopsi sistem pembayaran digital.

## 2. Saran

Pemerintah dan PT Astra perlu mengevaluasi efektivitas kemitraan ini dalam implementasi AstraPay. Jika sistem ini belum optimal, alternatif seperti integrasi dengan QRIS harus dipertimbangkan. Pemerintah juga harus memastikan mekanisme evaluasi yang jelas dan tidak hanya menyerahkan tanggung jawab kepada PT Astra Digital Arta. Jika AstraPay terbukti tidak efektif, langkah konkret seperti perbaikan sistem atau

penghentian kerja sama harus dilakukan. Peningkatan sosialisasi dan pemberian insentif seperti diskon atau *cashback* dapat mendorong lebih banyak pengguna beralih ke sistem ini. Selain itu, monitoring berkala diperlukan untuk menilai keberhasilan kemitraan dan memastikan bahwa sistem pembayaran di BRT lebih efisien, mudah digunakan, serta memberikan manfaat nyata bagi semua pihak.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Munawar. (2006). *Manajemen lalu lintas perkotaan*. Yogyakarta: Beta Offset.
- Andiyan, A., & Rachmat, A. (2021). *Telaahan Kerjasama Pemerintah Swasta Dalam Pembangunan Bandara Kertajati Di Jawa Barat*. Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, 7(2), 413-424.
- Aryani, Desi Yuli, & Rahdriawan, Mardwi. (2016). *Kajian peluang kerja sama pemerintah swasta (KPS) dalam penyediaan infrastruktur di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang*. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro.
- AstraPay. (n.d.). Home. Retrieved from <https://www.astrapay.com/home>.

- B.C Smith. (2007). *Good governance and development*. Palgrave Macmillan.
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Foreign and Commonwealth Office. (2012). *The Foreign and Commonwealth Office digital strategy*. London: HM Government. Retrieved from [https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/39629/AB\\_12-11-14\\_Digital\\_strategy.pdf](https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/39629/AB_12-11-14_Digital_strategy.pdf).
- Hoessein, Benyamin. (2001). *Prospek resolusi kebijakan dan implementasi otonomi daerah dari sudut pandang hukum tata negara*. Jakarta: LAN.
- Kementerian Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. (n.d.). *Susunan organisasi dinas*. Retrieved from <https://www.perhubungan.jatengprov.go.id/profil/susunan-organisasi-dinas>.
- Koswara. (2000). *Menyongsong pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999*. Jakarta: CSIS.
- Kurniawan, Ferry Made. (2019). *Permainan rakyat sebagai sumber belajar sosiologi SMA (studi kasus tradisi Mageburan di desa adat Sekumpul, Swan, Buleleng, Bali)*. (Skripsi). Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Maulana, M. R. (2021). *Pemahaman dan Pembelajaran Tahap Perencanaan dan Penyiapan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Melalui Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU)*. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 5(1).
- Moleong, Lexy J. (2000). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubasari, Rora Arina, & Martini, Rina. (2021). *Kemitraan Pemerintah Kota Semarang dengan PT. GoJek Indonesia sebagai penyedia layanan Go-Pay untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Semarang*. Journal of Politics and Government Studies, Universitas Diponegoro.
- Nikmah, Imas Ulin. (n.d.). *Kajian permasalahan komunikasi dan kerja sama pemerintah daerah: Analisis kerugian BRT Trans*

- Semarang Koridor 2 setelah pengoperasian BRT Trans Jateng Koridor 1*. *Journal of Politics and Government Studies*, 8.
- Nisjar, S., & Karhi. (1997). *Beberapa catatan tentang good governance*. *Jurnal Administrasi dan Pembangunan*, 1(2), 119.
- Nijkamp, P., van der Burch, M., & Vindigni, G. (2002). *A comparative institutional evaluation of public-private partnerships in Dutch urban land-use and revitalisation projects*. *Urban Studies*, 39(10), 1865–1880.
- Nurmayasari, Alfina, Erowati, Dewi, & Herawati, Nunik Retno. (n.d.). *Analisis permasalahan kerja sama Pemerintah Kota Semarang dengan PT Dompot Anak Bangsa dalam pemanfaatan layanan dan penerimaan pembayaran uang elektronik melalui Go-Pay (studi penelitian: pada Bus Rapid Transit Trans Semarang)*. *Journal of Politics and Government Studies*, 13(1).
- Pasolong, Harbani. (2010). *Teori administrasi publik*. Bandung: Alfabeta.
- Riawan, Weldy Anugra. (2018). *Analisis pelayanan bus rapid transit kapasitas sedang pada sistem transportasi perkotaan*. *Jurnal Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro*.
- Rosyadi, Khalid. (2010). *Public private partnership*. Retrieved from [https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UQ5y61pgZwQJ:https://www.academia.edu/7437379/Public\\_Private\\_Partnership+&cd=7&hl=id&ct=clnk&gl=id](https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UQ5y61pgZwQJ:https://www.academia.edu/7437379/Public_Private_Partnership+&cd=7&hl=id&ct=clnk&gl=id).
- Stanton, William J. (2009). *Prinsip pemasaran (Jilid I)*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, Gunawan. (1999). *Pemberdayaan masyarakat, jaring pengaman sosial*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yehezkiel-Devanno, S. (2023). *Analisis Kerja Sama Pemerintah Kota Semarang Dan Pt. Go-Jek Indonesia Dalam Menyediakan Pembayaran Go-Pay Untuk BRT Trans Semarang Sebagai Langkah Peningkatan Layanan Publik*. *Journal of Politics and Government Studies*, 12(3), 595-604